

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGKAPAN IKAN DENGAN
MENGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI PERAIRAN BINTAN (Studi
Kasus Nomor 46/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg)**

**Oleh
Vinanti Putri Tilani
190574201078**

Abstrak

Pokok masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan yang dilakukan Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dan Kejaksaan Negeri Bintan dalam melakukan penegakan Hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Kabupaten Bintan serta Apa hambatan yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Kabupaten Bintan. Penangkapan Ikan secara ilegal merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada serta merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Penangkapan ikan secara illegal di Indonesia adalah segala bentuk penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai macam upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam melakukan Penegakan Hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal serta mengetahui berbagai macam hambatan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dan Kejaksaan Negeri Bintan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. Metode ini analisis yang digunakan oleh penulis bersifat kualitatif, memilih penelitian Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Modus operandi penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut di Kabupaten Bintan, seperti penggunaan bom ikan dan alat tangkap terlarang, terus berlangsung meskipun ada regulasi yang melarangnya. Penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan semua orang mematuhi aturan dan hukum. Dalam, hukum pidana, penegakan hukum berarti mengambil tindakan untuk mencegah orang melanggar hukum. Hambatan dalam tindak pidana penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut di Kabupaten Bintan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup upaya penegakan hukum yang lebih tegas, pengawasan yang lebih optimal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penangkapan Ikan, Bahan Peledak

A JURIDICAL ANALYSIS OF FISHING USING EXPLOSIVES IN BINTAN WATERS
(Case Study Number 46/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg)

By
Vinanti Putri Tilani
190574201078

Abstract

The core issues addressed in this study are: the juridical analysis of the criminal offense of fishing using explosives in the waters of Bintan Regency, specifically regarding the law enforcement actions taken by the Bintan Regency Marine and Fisheries Agency and the Bintan District Attorney's Office; and the obstacles encountered in enforcing laws against illegal fishing in these waters. Illegal fishing is defined as fishing activity conducted in violation of existing regulations and constitutes an unlawful act. In Indonesia, illegal fishing encompasses any form of fishing that violates Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. The study aims to identify the various measures taken by the Bintan Regency Marine and Fisheries Agency and the Tanjungpinang District Attorney's Office to enforce laws against illegal fishing, as well as to identify the obstacles faced by the Bintan Regency Marine and Fisheries Agency and the Bintan District Attorney's Office in this enforcement process. The author employs a qualitative analysis method, focusing the research on the Tanjungpinang Marine and Fisheries Agency and the Tanjungpinang District Attorney's Office. Destructive fishing practices such as the use of fish bombs and prohibited gear persist in Bintan Regency waters despite regulations banning them. Law enforcement entails efforts to ensure compliance with rules and laws; in the context of criminal law, it involves taking action to prevent individuals from violating the law. Addressing the challenges associated with destructive fishing in Bintan Regency requires a comprehensive and sustainable approach, incorporating stricter law enforcement, optimized surveillance, and economic empowerment for coastal communities.

Keyword: *Law Enforcement, Fishing, explosives*